

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI KAWASAN ASIA PASIFIK (Analysis of Factors That Affecting Corruption in Asia-Pacific Region)

Happy Febrina Hariyani¹, Dominicus Savio Priyarsono², Alla Asmara²

¹Mahasiswa Magister Program Studi Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana IPB.

²Staf pengajar Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian IPB

ABSTRACT

The phenomenon of corruption is a big problem faced by countries with rapid economic development. The problem is not only faced by developing countries, but also in some developed countries. The factors that cause corruption classified into three broad categories--economic, political and socio-cultural. The high level of corruption in a country can also cause high cost economy that could hamper economic growth through the obstacles that occur in the investment. The purpose of this study is to analyze the factors that affect the level of corruption and to analyze the impact of corruption on economic growth in the Asia Pacific region. The results show that public budget, political stability, and urban population affect the level of corruption. Low institutional quality, indicated by the failure of the government (corruption), has a bad influence on economic growth performance.

Keywords: Asia Pacific, Corruption, High Cost Economy

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, sepanjang insentif yang dihasilkan cukup besar. Penyakit korupsi ini bisa terjadi di sektor publik maupun swasta, bahkan di tingkat masyarakat. Fenomena korupsi juga merupakan masalah besar yang dihadapi negara-negara dengan per-kembangan ekonomi pesat. Masalah korupsi tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, namun juga di beberapa negara-negara maju sekalipun.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab korupsi yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar, yaitu faktor ekonomi, politik dan sosial budaya. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Pembangunan ekonomi melalui

pendidikan, adanya kelas penciptaan kelas menengah ditemukan sebagai penentu terkuat untuk mengurangi korupsi di banyak studi (Treisman, (2000), Paldam (2002)). Faktor politik yang menjelaskan korupsi misalnya demokrasi, keefektifan pemerintah dan desentralisasi.

Demokrasi elektoral misalnya, di satu sisi pemilihan kompetitif cenderung mengurangi korupsi *actor* lama yang korup dan memilih keluar dari pemilihan. Di sisi lain, kebutuhan untuk membiayai kampanye politik dapat menyebabkan politisi memperdagangkan keputusan politik untuk pendanaan. Pada tingkat deskriptif, terdapat negara-negara yang tidak cocok dengan pola “negara yang lebih demokratis adalah negara yang tingkat korupsinya rendah”. Sedangkan faktor sosial budaya dan sejarah korupsi telah disoroti sebagai

efek dari nilai-nilai budaya, warisan kolonial, *ethnic diversity*, kualitas regulasi dan *urban population*.

Dalam perspektif hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi, para ekonom, sejarawan dan ahli politik telah terlibat dalam perdebatan panjang tentang apakah korupsi membahayakan pertumbuhan ekonomi. Pandangan umum menyatakan bahwa korupsi dapat mendistorsi alokasi sumberdaya yang efisien dalam perekonomian. Sebagian besar ekonom memandang bahwa korupsi menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi.

Menurut Blackburn *et al.* (2006), korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. Namun, beberapa orang menganggap bahwa korupsi digunakan sebagai *oiling the wheel* untuk birokrasi, terkadang korupsi juga dapat bermanfaat bagi perekonomian (Huntington, 1968; Lui, 1985). Sebaliknya, Tanzi (1998) mengklaim bahwa korupsi dapat menimbulkan biaya birokrasi yang besar.

Ancaman korupsi yang sudah menjadi endemik ini menjadi permasalahan besar di seluruh negara tidak terkecuali sejumlah negara di Asia Pasifik. Menurut Uni Sosial Demokrat (2015) sekitar sepertiga dana investasi publik dikorupsi dan terjadi penggelembungan harga dalam berbagai proyek atau menerima suap dalam kisaran 20-100%.

Angka-angka korupsi di kawasan Asia Pasifik termasuk dramatis, hal ini didukung dari laporan *Transparency International* (2015) bahwa 64% negara di kawasan ini berada pada indeks di bawah 50 yang berarti sebanyak 64% negara-negara di kawasan Asia Pasifik memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. Meskipun mendukung rencana

anti korupsi untuk kawasan Asia Pasifik, pemerintah daerah dibebani oleh endemik korupsi yang menghambat pemerintahan di daerah.

Korupsi dapat terjadi karena kualitas pemerintahan yang, dimana kualitas lembaga pemerintahan mempengaruhi investasi dan pertumbuhan sebanyak variabel ekonomi politik lain. Tingginya tingkat korupsi di suatu negara juga dapat menimbulkan *high cost economy* yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui hambatan yang terjadi pada investasi (Damanhuri, 2010).

Berdasarkan deskripsi di atas, maka inti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang memengaruhi tingkat korupsi di kawasan Asia Pasifik. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan korupsi di Asia Pasifik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Korupsi

Menurut *World Bank*, definisi paling sederhana dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Nawatmi (2014), menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindakan korupsi diantaranya apabila memberi atau menerima hadiah atau janji dan penyuaipan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi bagi pegawai

negeri atau penyelenggara negara. Secara umum korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi.

Korupsi adalah setiap transaksi antara pelaku dari sektor swasta dan sektor publik melalui utilitas bersama yang secara ilegal ditransformasikan menjadi keuntungan pribadi (*World Bank*, 1997). Menurut *Transparency International*, korupsi besar terdiri dari tindakan yang dilakukan pemerintah yang mendistorsi kebijakan atau fungsi utama negara, yang memungkinkan para pemimpin untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan para pemimpin untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan publik.

Transparency International menggunakan *Corruption Perception Index* atau Indeks Persepsi Korupsi untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara dalam sektor publik. CPI merupakan indikator agregat yang menggabungkan berbagai sumber informasi tentang korupsi, sehingga memungkinkan untuk membandingkan tingkat korupsi setiap negara.

Semua sumber informasi yang digunakan untuk membangun CPI dihasilkan oleh organisasi pengumpul data yang terkemuka. Sumber yang disertakan dalam CPI harus bisa mengukur cakupan keseluruhan tingkat korupsi (frekuensi dan ukuran transaksi) di sektor publik dan politik, dimana sumber tersebut memberikan peringkat pada setiap negara dan peringkat ini merepresentasi tingkat korupsi yang berbeda di setiap negara. Metodologi yang digunakan untuk menilai indeks persepsi korupsi ini harus sama untuk semua negara yang diambil dari sumber yang terpilih. Jumlah survei dan penilaian yang disertakan berbeda dari

tahun ke tahun tergantung pada ketersediaan data.

Bentuk atau perwujudan utama korupsi menurut Amundsen dalam Andvig *et al.* (2000) menyebutkan bahwa terdapat 6 karakteristik dasar korupsi, yaitu:

1. Suap (*Bribery*) adalah pembayaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Suap merupakan jumlah yang tetap, persentase dari sebuah kontrak, atau bantuan dalam bentuk uang apapun. Biasanya dibayarkan kepada pejabat negara yang dapat membuat perjanjian atas nama negara atau mendistribusikan keuntungan kepada perusahaan atau perorangan dan perusahaan.
2. Penggelapan (*Embezzlement*) adalah pencurian sumberdaya oleh pejabat yang diajukan untuk mengelolanya. Penggelapan merupakan salah satu bentuk korupsi ketika pejabat pemerintah yang menyalahgunakan sumberdaya public atas nama masyarakat.
3. Penipuan (*Fraud*) adalah kejahatan ekonomi yang melibatkan jenis tipu daya, penipuan atau kebohongan. Penipuan melibatkan manipulasi atau distorsi informasi oleh pejabat publik. Penipuan terjadi ketika pejabat pemerintah mendapatkan tanggungjawab untuk melaksanakan perintah. Memanipulasi aliran informasi untuk keuntungan pribadi.
4. Pemerasan (*Extortion*) adalah sumberdaya yang diekstraksi dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau ancaman. Pemerasan adalah transaksi korupsi dimana uang diekstraksi oleh

mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya.

5. Favoritisme adalah kecenderungan diri dari pejabat negara atau politisi yang memiliki akses sumberdaya negara dan kekuasaan untuk memutuskan pendistribusian sumberdaya tersebut. Favoritisme juga memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Selain itu, favoritisme juga mengembangkan mekanisme penyalahgunaan kekuasaan secara privatisasi.
6. Nepotisme adalah bentuk khusus dari favoritism, mengalokasikan kontrak berdasarkan kekerabatan atau persahabatan.

Chetwynd *et al.* (2003) menyatakan bahwa korupsi memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi berdasarkan beberapa teori berikut:

1. Korupsi menghalangi investasi asing dan domestik. Biaya sewa meningkat dan menciptakan ketidakpastian, menurunkan insentif pada kedua investor asing dan domestik.
2. Korupsi pajak kewirausahaan. Pengusaha dan inovator memerlukan lisensi dan izin dan membayar suap untuk pemotongan barang ke dalam margin keuntungan.
3. Korupsi menurunkan kualitas infrastruktur publik. Sumberdaya public dialihkan ke penggunaan pribadi, standar diabaikan, dana untuk operasional dan pemeliharaan dialihkan ke kepentingan pribadi.
4. Korupsi menurunkan pendapatan pajak. Perusahaan dan kegiatan yang didorong ke sektor informal dengan mengambil sewa berlebihan dan pajak dikurangi dengan

imbalan hadiah kepada pejabat pajak.

5. Korupsi mengalihkan bakat menjadi *rent seeking*. Pejabat yang seharusnya dapat terlibat dalam kegiatan produktif menjadi beralih ke pengambilan keuntungan dari sewa, dimana mendorong dan meningkatkan pengambilan biaya sewa.
6. Korupsi merusak komposisi pengeluaran publik. Pencari keuntungan akan mencari proyek paling termudah dan terselubung, mengalihkan dana dari sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Terlepas dari tingkatan sosial dan pembangunan ekonomi yang ada di setiap negara, korupsi dapat terjadi dimana saja. Korupsi umumnya terjadi di sektor public dan sektor swasta, dan khususnya terjadi pada pejabat publik yang memiliki tanggungjawab langsung atas ketetapan pelayanan publik dan regulasi khusus. Secara politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana korupsi dapat menghancurkan proses formal yang sudah dibentuk. Korupsi pada pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembuatan kebijakan; korupsi pada sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi pada pemerintahan publik yang menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan pada masyarakat. Korupsi juga menurunkan legitimasi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi (Nawatmi, 2014).

Pada sektor ekonomi, Nawatmi (2014) menambahkan bahwa korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dimana pada sektor privat, korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan resiko pembatalan perjanjian atau karena

adanya penyidikan. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi yaitu adanya sogokan yang menyebabkan pejabat dapat membuat aturan baru dan hambatan baru. Dengan demikian, korupsi juga bisa mengacaukan perdagangan. Perusahaan yang berada pada lingkup pemerintahan akan terlindungi dari persaingan, hal tersebut menyebabkan perusahaan menjadi tidak efisien. Dampak negatif dari korupsi lainnya adalah pengalihan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat dimana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Hal tersebut menimbulkan sebuah distorsi pada sektor publik

Demokrasi

Freedom House menyatakan bahwa hak-hak politik merupakan serangkaian hak untuk menjamin terlaksananya sistem politik demokratis, antara lain berupa hak-hak yang menjamin orang untuk bergabung dengan partai-partai dan organisasi politik, berkompetisi untuk menduduki jabatan-jabatan publik, memberikan suara secara bebas untuk calon-calon alternatif melalui pemilihan umum yang absah, dan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar dianggap akan membawa pengaruh nyata terhadap kebijakan publik serta yang bertanggungjawab kepada pemilih. Sementara itu, menurut *Freedom House*, kebebasan sipil meliputi kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak untuk berserikat dan berkumpul, *rule of law*, otonomi pribadi, termasuk kebebasan ekonomi tanpa campur tangan negara.

Stabilitas Politik

Aleksandra (2000) menemukan bahwa stabilitas merupakan prasyarat

penting untuk mitigasi korupsi yang sukses. Kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil memungkinkan pemerintah dan warga negara untuk mempromosikan mekanisme transparan dalam pemantauan, penilaian dan pengendalian korupsi.

Aleksandra juga menunjukkan bahwa korupsi merajalela di negara-negara di Eropa Tenggara yang mengalami transisi politik. Sering kali transisi ini disertai dengan ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial. Ketidakstabilan ini dapat membuat korupsi menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia untuk warga negara, termasuk pejabat pemerintah untuk bertahan hidup. Berdasarkan penelitian tersebut, stabilitas politik dapat memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat korupsi.

Keterbukaan Ekonomi

Ades dan Di Tella (1995 dan 1997) menyimpulkan bahwa *economic openness* atau keterbukaan ekonomi (diukur dari rasio impor dan ekspor terhadap GDP) telah merangsang persaingan ekonomi yang adil yang menurunkan sewa ekonomi dan meningkatkan tingkat pengendalian korupsi melalui keterbukaan ekonomi. Keterbukaan ekonomi mempromosikan integrasi ekonomi dengan ekonomi global. Akibatnya, pelaku ekonomi domestik harus mampu bersaing dengan pesaing mereka dari luar negeri untuk bertahan hidup dan atau untuk meraih peluang pasar di negara-negara lain.

Perkembangan ini dapat merangsang sektor swasta dalam negeri untuk beroperasi secara lebih efisien. Di sisi lain, hal itu juga akan merangsang pemerintah agar lebih cepat tanggap dan memperkenalkan peraturan yang lebih efisien, dengan mengurangi birokrasi dan monopoli serta menerapkan

perekonomian yang lebih kompetitif. Singkatnya, kombinasi upaya sektor publik dan swasta akan memperkuat pengendalian korupsi.

Anggaran Publik (*Publik Budget*)

Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian yang dapat diwakili oleh rasio anggaran publik terhadap GDP dapat memperkuat tingkat korupsi. Secara khusus, Elliot (1997) menunjukkan bahwa tingkat korupsi meningkat dengan tingkat anggaran pemerintah relatif terhadap GDP. Keterlibatan pemerintah dapat mempromosikan monopoli, dan mencegah kompetisi terbuka dan adil di antara pelaku usaha, perkembangan tersebut yang akan mendorong korupsi. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus memberikan lebih banyak kesempatan bagi sektor swasta dan tetap fokus sebagai regulator ekonomi.

Kualitas Regulasi dan *Urban Population*

Kualitas regulasi telah diprediksi memiliki hubungan negatif dengan tingkat korupsi dengan regulasi berkualitas tinggi yang jelas, komprehensif dan mudah dilaksanakan. Ketiga kualitas tersebut dapat membantu dalam mekanisme anti korupsi di suatu negara agar berfungsi lebih efektif.

Merujuk pada pendapat Gillespie dan Okruhlik (1991) dikemukakan bahwa terdapat empat strategi untuk memberantas korupsi. Pertama menegakkan hukum yang adil dan konsisten bagi para pelaku korupsi, kedua melibatkan masyarakat dalam mendeteksi korupsi, ketiga melakukan reformasi dalam sektor publik dengan meningkatkan tingkat akuntabilitas, transparansi, dan strategi yang keempat

yaitu melakukan peningkatan kualitas regulasi yang mengatur tindak korupsi.

Korupsi sebagai misalokasi sumber daya, maka diperlukan pemberantasan korupsi dan pengawasan dalam pelaksanaan regulasi. Supaya kebijakan yang dibuat tidak menjadi sia-sia. Komitmen pemerintah, penegak hukum dan masyarakat akan menjalankan pemerintahan yang bersih juga perlu ditingkatkan. Bagaimanapun baiknya peraturan dibuat, jika tidak ada komitmen dalam pelaksanaannya maka peraturan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Selain itu, proporsi penduduk perkotaan juga dapat memiliki hubungan negatif dengan tingkat korupsi, karena warga perkotaan cenderung berpendidikan dan lebih terlibat dalam kegiatan masyarakat sipil, seperti menjadi lembaga pengawas untuk mendorong akuntabilitas pemerintah.

Studi Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Ades dan Di Tella (1995 dan 1997), menyimpulkan bahwa keterbukaan ekonomi yang diukur dengan rasio impor terhadap PDB dapat merangsang persaingan ekonomi yang adil yang menurunkan sewa ekonomi dan meningkatkan tingkat pengendalian korupsi melalui keterbukaan ekonomi. Keterbukaan ekonomi mempromosikan integrasi ekonomi dengan ekonomi global. Akibatnya, pelaku ekonomi domestik harus mampu bersaing dengan rekan-rekan mereka dari luar negeri untuk bertahan hidup dan untuk meraih peluang pasar di negara-negara lain.

Perkembangan ini bisa merangsang sektor swasta dalam negeri untuk beroperasi secara lebih efisien. Di sisi lain, hal itu juga akan merangsang pemerintah memperkenalkan peraturan

yang lebih efisien, dengan mengurangi birokrasi dan monopoli, serta mencari perekonomian yang lebih kompetitif. Singkatnya, kombinasi upaya sektor publik dan swasta bisa memperkuat pengendalian korupsi.

Sejalan dengan pendapat di atas, penelitian lain menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam perekonomian yang diwakili oleh rasio anggaran publik terhadap PDB bisa melemahkan pengendalian korupsi. Secara khusus, Elliot (1997) menunjukkan bahwa pengendalian korupsi menurun dengan tingkat anggaran pemerintah relatif terhadap PDB. Keterlibatan pemerintah dapat mempromosikan monopoli dan mencegah kompetisi terbuka dan adil di antara pelaku usaha, perkembangan yang mendorong korupsi. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus memberikan lebih banyak kesempatan bagi sektor swasta dan tetap fokus sebagai regulator ekonomi.

Aleksandra (2000) menemukan bahwa stabilitas merupakan prasyarat penting untuk mitigasi korupsi yang sukses. kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil memungkinkan pemerintah dan warga negara untuk mempromosikan mekanisme transparan pemantauan korupsi, assesment dan control terhadap korupsi. Korupsi merajalela di negara-negara di Eropa Tenggara yang mengalami transisi politik. Sering kali, transisi ini disertai dengan ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial. Ketidakstabilan ini dapat membuat korupsi satu-satunya pilihan yang tersedia untuk warga negara, termasuk pejabat pemerintah, untuk bertahan hidup. Membaca dari penelitian ini, stabilitas politik dapat memiliki hubungan yang positif dengan pengendalian korupsi.

METODE PENELITIAN

Model Data Panel

Data yang dipergunakan dalam analisis ekonometrika dapat berupa data time series, data cross section, atau data panel. Data panel (*panel pooled data*) merupakan gabungan data *cross section* dan data *time series*. Dengan kata lain, data panel merupakan unit-unit individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, data panel dicirikan oleh T periode waktu ($t = 1, 2, \dots, T$) yang kecil dan n jumlah individu ($i = 1, 2, \dots, n$) yang besar. Namun tidak menutup kemungkinan sebaliknya, yakni data panel terdiri dari periode waktu yang besar dan jumlah individu yang kecil. Regresi dengan menggunakan data panel disebut dengan model regresi data panel.

Beberapa keuntungan penggunaan data panel diantaranya sebagai berikut :

1. Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model (*unobserved individual heterogeneity*).
2. Data panel mampu mengurangi kolinearitas antar variabel.
3. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu karena unit data lebih banyak.

Metode data panel memiliki dua pendekatan, yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Keduanya dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya korelasi antara komponen error dengan peubah bebas.

Misalkan:

$$y_{it} = \alpha_i + X_{it}\beta + \epsilon_{it} \quad (5)$$

Pada *one way error components model*, komponen error dispesifikasikan dalam bentuk:

$$e_{it} = \lambda_i + u_{it} \tag{6}$$

Sedangkan *two way error components model*, komponen error dispesifikasi dalam bentuk:

$$\varepsilon_{it} = \lambda_i + \mu_{it} + u_{it} \tag{7}$$

Perbedaan antara FEM dan REM terletak pada ada atau tidaknya korelasi antara λ_i dan μ_{it} dengan X_{it} . Uji yang digunakan dalam penentuan kedua metode ini adalah uji Hausman.

Fixed Effect Model (FEM)

FEM muncul ketika antara efek individu dan peubah penjelas memiliki korelasi dengan X_{it} atau memiliki pola yang sifatnya tidak acak. Asumsi ini membuat komponen error dari efek individu dan waktu dapat menjadi bagian dari intersep, yaitu:

Untuk *one way error component*:

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_i + X_{it} \beta + u_{it} \tag{8}$$

Untuk *two way error component*:

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_i + \mu_{it} + X_{it} \beta + u_{it} \tag{9}$$

Penduga pada FEM dapat dihitung dengan beberapa teknik yaitu: (1) Pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), (2) Pendekatan *Within Group* (WG), (3) Pendekatan *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

Random effects Model (REM)

REM muncul ketika antara efek individu dan regresor tidak ada korelasi. Asumsi ini membuat komponen *error* dari efek individu dan waktu dimasukkan ke dalam *error*, dimana:

Untuk *one way error component*:

$$y_{it} = \alpha_i + X_{it} \beta + u_{it} + \lambda_i \tag{10}$$

Untuk *two way error component*:

$$y_{it} = \alpha_i + X_{it} \beta + u_{it} + \lambda_i + \mu_{it} \tag{11}$$

Beberapa asumsi yang biasa digunakan dalam REM, yaitu:

$$E(u_{it} | \tau_i) = 0$$

$$E(u_{it} | \tau_i) = \sigma_{\tau_i}^2 \tag{12}$$

$$E(u_{it} | \chi_{it}) = 0 \tag{13}$$

$$E(\tau_i^2 | \chi_{it}) = \sigma_{\tau_i}^2 \tag{14}$$

$$E(u_{it} \tau_j) = 0 \tag{15}$$

untuk $i \neq j$ dan $t \neq s$

$$E(u_{it} u_{js}) = 0 \tag{16}$$

untuk $i \neq j$

$$E(\tau_i \tau_j) = 0 \tag{17}$$

dimana:

Untuk *one way error component*, $\tau_i = \lambda_i$

Untuk *two way error component*, $\tau_i = \lambda_i + \mu_i$

Dari semua asumsi di atas, yang paling penting dikaitkan dengan REM adalah asumsi bahwa nilai harapan dari x_{it} untuk setiap τ_i adalah 0, atau $E(\tau_i x_{it}) = 0$. Terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan untuk menghitung estimator REM, yaitu *between estimator* dan *Generalized Least Square* (GLS).

Uji Hausman

Pengujian terhadap asumsi ada tidaknya korelasi antara regresor dan efek individu digunakan untuk memilih apakah *fixed* atau *random effects* yang lebih baik. Alat ujinya dapat digunakan *Hausman Test*. Dalam uji ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0: E(\tau_i | x_{it}) = 0 \tag{18}$$

atau REM adalah model yang tepat

$$H_1: E(\tau_i | x_{it}) \neq 0 \tag{19}$$

atau FEM adalah model yang tepat

Sebagai dasar penolakan H0 maka digunakan statistik Hausman dan membandingkannya dengan *Chi square*. Statistik Hausman dirumuskan dengan:

$$H = (\beta_{REM} - \beta_{FEM})' (M_{FEM} - M_{REM})^{-1} (\beta_{REM} - \beta_{FEM}) \sim \chi^2(k) \quad (20)$$

dimana:

M = matriks kovarians untuk parameter β

k = *degrees of freedom*

Jika nilai H hasil pengujian lebih besar dari χ^2 tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap H0 sehingga model yang digunakan adalah model fixed effects, begitu juga sebaliknya.

Model Empirik

Model yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi di kawasan Asia Pasifik mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Churchill *et al* (2013).

$$COR_{it} = \alpha + \beta_1 DEM_{it} + \beta_2 POL_{it} + \beta_3 EOP_{it} + \beta_4 PUB_{it} + \beta_5 REG_{it} + \beta_6 URB_{it} + \beta_7 D_{it} + \varepsilon_{it} \quad (21)$$

Dimana,

COR_{it} = Indeks persepsi korupsi (indeks)

DEM_{it} = Indeks demokrasi (indeks)

POL_{it} = Indeks stabilitas politik (indeks)

EOP_{it} = Keterbukaan ekonomi (%)

PUB_{it} = Public budget (% GDP)

REG_{it} = Kualitas regulasi (indeks)

URB_{it} = Urban population (% total populasi)

D_{it} = Dummy Negara maju (1 = negara maju, 0 = negara berkembang)

α = intersep

$\beta_1 - \beta_7$ = koefisien

ε_{it} = *error term*

Data yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 17 negara di kawasan Asia Pasifik untuk kurun waktu 11 tahun (2004-2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan apakah *fixed effects model* atau *random effects model* yang lebih sesuai. Ho dari uji Hausman yaitu *random effect* dan sedangkan H₁ yaitu *Fixed effect*. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak jumlah variabel bebas dari model. Uji kesesuaian model data panel dengan *fixed effects* dan *random effects* menggunakan tes Hausman menunjukkan nilai p-value $\chi^2(\text{prob.}) < 0,05$.

Hal ini berarti bahwa model persamaan faktor-faktor yang memengaruhi korupsi di kawasan Asia Pasifik memiliki heterogenitas individu secara *fixed*. Dengan demikian *fixed effects model* lebih sesuai digunakan. Pemilihan model *fixed effect* secara teori juga lebih tepat. Apabila tidak dapat ditentukan secara teoritis dampak gangguannya, maka model *random effect* dipilih jika data diambil dari sampel individu yang merupakan sampel acak dari populasi yang lebih besar. Namun jika evaluasi meliputi seluruh individu dalam populasi atau hanya beberapa individu dengan penekanan pada individu-individu tersebut maka lebih baik digunakan model *fixed effect*. Dalam penelitian ini karena jumlah *cross-section* dari persamaan mencerminkan seluruh populasi (17 negara di Asia Pasifik), maka model *fixed effect* lebih baik secara teori.

Tabel 1 Hasil Pengolahan *Hausman Test*

<i>Correlated Random Effects – Hausman Test</i>			
<i>Equation: Untitled</i>			
<i>Test cross-section random effects</i>			
<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq Statistic</i>	<i>Chi-Sq d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	16,94	7	0,01

Hasil Regresi

Faktor-faktor dalam analisis ini adalah faktor ekonomi, politik dan sosial. Analisis ini berdasarkan kombinasi teori dan model yang dibangun oleh Churchill *et al.* (2013). Pada analisis ini, transformasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dilakukan melalui $COR_{it} = (1 - \theta/10)$ menjadi sebuah indeks yang bernilai mulai dari “0” sampai “1” dimana semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi tingkat korupsi. Transformasi ini dilakukan agar interpretasi searah, sederhana, dan intuitif pada estimasi model data panel.

Tabel 2 Hasil Estimasi Model Analisis Menggunakan Metode *Fixed Effect Model*

Var	Variabel Dependen Korupsi (COR)		
	Koefisien	<i>Std. Error</i>	Prob.
C	8,689859	0,422249	0,0000*
DEM	-0,007045	0,030237	0,8160
EOP	-0,000293	0,005324	0,0029*
PUB	0,012557	0,004160	0,0030*
POL	-0,417943	0,082439	0,0000*
URB	-0,061448	0,006923	0,0000*
REG	-0,059904	0,193070	0,7568
<i>Dummy</i>	-0,770041	0,251513	0,0026*

Keterangan: *) signifikasi pada $\alpha = 5\%$

Hasil estimasi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel keterbukaan ekonomi yang dihitung

sebagai rasio impor dan ekspor terhadap total GDP memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5% terhadap tingkat korupsi di tujuh belas negara kawasan Asia Pasifik. Peningkatan keterbukaan ekonomi sebesar 1% akan menurunkan korupsi sebesar 0,0029 poin indeks dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil estimasi ini bertentangan dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya bahwa keterbukaan ekonomi dapat membuka pasar domestik bagi produsen asing. Selain itu, keterbukaan ekonomi dapat meningkatkan transaksi lintas batas yang rentan terhadap korupsi. Hasil tersebut dapat pula menunjukkan bahwa adanya keterlibatan pejabat pemerintah atau perbatasan dalam operasi memberantas pungutan liar (Churchill *et al.*, 2013).

Variabel *public budget* menunjukkan hubungan yang positif terhadap tingkat korupsi dan berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5%. Peningkatan *public budget* sebesar 1% akan meningkatkan tingkat korupsi besar 0,012557 poin indeks dengan asumsi *ceteris paribus*. Anggaran publik terhadap GDP bisa melemahkan pengendalian korupsi, atau meningkatkan tingkat korupsi. Elliot (1997) menunjukkan bahwa pengendalian korupsi menurun dengan tingkat anggaran pemerintah yang relatif terhadap GDP. Keterlibatan pemerintah dapat mempromosikan monopoli dan mencegah kompetisi terbuka dan adil di antara pelaku usaha, serta perkembangan yang mendorong korupsi. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus memberikan lebih banyak kesempatan bagi sektor swasta dan tetap fokus sebagai regulator ekonomi.

Hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel stabilitas

politik (POL) sebesar 0,417943. Stabilitas politik mempunyai memiliki hubungan negatif terhadap tingkat korupsi dan signifikan pada taraf nyata 5%. Meningkatnya stabilitas politik sebesar 1 poin indeks akan menurunkan tingkat korupsi sebesar 0,417943 poin indeks dengan asumsi *ceteris paribus*.

Mengurangi tindakan korupsi merupakan proses yang panjang, yang memerlukan upaya terus menerus dari pemerintah dan masyarakat sipil. Tanpa stabilitas politik, proses yang terus menerus dan panjang tersebut tidak efektif. Selain itu, stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi penegakan hukum dan penegakan hukum merupakan prasyarat untuk mengendalikan korupsi. Negara yang tidak stabil cenderung mengalami perubahan rezim yang sering. Rezim tersebut cenderung menyalahgunakan politik yang relatif singkat untuk kekuasaan mereka dalam mendapatkan keuntungan pribadi mereka melalui korupsi (Churchill *et al.*, 2013).

Variabel *urban population* mempunyai hubungan yang negatif terhadap tingkat korupsi dan signifikan pada taraf 5%. Meningkatnya *urban population* sebesar 1%, maka akan menurunkan tingkat korupsi sebesar 0,061448 poin indeks dengan asumsi *ceteris paribus*. Sampai pada tingkat tertentu, penduduk perkotaan memiliki hubungan negatif dengan pengendalian korupsi, namun pada titik tertentu penduduk perkotaan ternyata dapat memiliki hubungan yang negatif. Hal tersebut berarti bahwa pada tingkat tertentu hubungan *urban population* terhadap tingkat korupsi dapat berhubungan positif dan negatif.

Hasil regresi dari model korupsi diperoleh koefisien untuk variabel dummy negara sebesar 0,770041 dengan hubungan negatif pada tingkat

signifikansi 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perbedaan tingkat korupsi di negara berkembang terhadap negara maju adalah sebesar 0,770041 poin indeks.

Negara-negara berkembang dikenal dengan tingkat korupsi yang sangat besar. Hal tersebut menjadi perhatian utama untuk setiap pemerintah dan warga negara yang baik dari bangsa tersebut. Jumlah yang tak terbayangkan dari dana yang dikeluarkan untuk mengekang atau melawan korupsi, sesuatu yang tidak seharusnya jika hanya orang-orang atau warga negara dapat menyadari integritas dan nilai yang berada di atas hal lainnya. Demikian juga, sistem tidak lagi harus membuka jalan untuk korupsi. Sebuah sistem yang lemah dan miskin standar hidup adalah kekuatan pendorong utama untuk korupsi yang gencar terjadi di negara berkembang.

Di negara-negara berkembang, korupsi mengambil bentuk atau fase yang berbeda. Beberapa bentuk tersebut berupa *overpricing*, percepatan pembayaran ilegal, fasilitasi kontrak, penawaran *rigging* publik untuk kontrak melalui manipulasi peraturan dan menjual informasi, dana ilegal, pengalihan dana untuk proyek khusus, pencucian uang, dan sejenisnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari regresi data panel analisis factor-faktor yang memengaruhi korupsi di kawasan Asia Pasifik dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, faktor ekonomi dengan variabel keterbukaan ekonomi berpengaruh negatif dengan tingkat korupsi dan anggaran sektor publik (*public budget*) yang mempunyai pengaruh positif

terhadap tingkat korupsi. **Kedua**, demokrasi dan stabilitas politik sebagai proksi dari faktor politik. Stabilitas politik memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. **Ketiga**, faktor sosial dalam penelitian ini ditunjukkan oleh variabel *urban population* dan kualitas regulasi. Proporsi penduduk perkotaan menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Hubungan tersebut bersifat non-linear tergantung dari seberapa besar proporsi tersebut.

Saran

1. Ketidakstabilan politik bukanlah sesuatu yang pemerintah tidak dapat mengontrol tetapi sulit untuk mencapai terutama ketika ketidakstabilan politik dikombinasikan dengan konflik lainnya yang sudah mengakar dalam di masyarakat. Sebagai contoh, beberapa konflik dalam konflik agama, etnis, atau ideologi. Pemerintah dan masyarakat dapat memperbaiki situasi dengan mempromosikan dialog sebagai sarana utama untuk menemukan solusi. Selain itu, karena konflik politik yang utama adalah tentang perebutan kekuasaan, pemerintah harus menerapkan demokrasi yang transparan dan adil yang menjamin kesempatan bagi semua pihak untuk memiliki akses ke kekuasaan. Jika perlu, mereka bisa mengundang organisasi internasional untuk terlibat dalam proses politik, seperti pemilihan, sebagai pengamat atau pengawas.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis dampak korupsi terhadap kemiskinan, dan *social*

welfare di suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan poin-poin tersebut. Penelitian lain dengan mengembangkan dampak korupsi secara jangka panjang juga dapat dilakukan mengingat beberapa penelitian sebelumnya hanya mengidentifikasi dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

DAFTAR PUSTAKA

- Ades A, Di Te. 1995. *Competition and Corruption*. Draft Paper. Keble College. Oxford University
- Aleksandra F. 2000. *Stability and Corruption in South Eastern Europe – Corruption is a Way of Life in South-Eastern Europe – a Necessary Method of Survival*. South-East Europe Review. 4/2000
- Andvig JC, Fjeldstad OH, Amundsen I, Sissener T, Søreide T. 2000. *Research on Corruption: A Policy Oriented Survey*. [NORAD] Norwegian Agency for Development Co-operation.
- Blackburn, Keith NB, and M. Emranul H. 2006. Economic Discussion Paper EDP-0530. The University of Manchester.
- Chetwynd E, Frances C, Bertram S. 2003. *Corruption and Poverty :A Review of Recent Literature (Final Report)*. Washington DC: Management System International.
- Churchill, Ransford Q, Agbodohu W, Arhenful. P. 2013. *Determining Factors Affecting Corruption: A Cross Country Analysis*. International Journal of Economics, Business, and

- Finance, Vol 1, No. 10, November 2013, pp : 275-258.
- Damanhuri DS. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Berkembang*. Bogor: IPB Press.
- Elliott KA. 1997. *Corruption as an International Policy Problem: Overview and Recommendation*.
- Gillespie K, Gwenn O. 1991. *The Political Dimensions of Corruption Cleanups: A Framework for Analysis*. Comparative Politics, Vol. 24, No.1.
- Huntington SP. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press
- Lui F. 1985. *An Equilibrium Queuing Model of Bribery*. Journal of Political Economy. August, 93(4): 760-781.
- Mo PH. 2000. *Corruption and Economic Growth*. Journal of Comparative Economics. 29:66-79.
- Nawatmi S. 2014. *Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2014, Hal 73-82, Vol 21. No.1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang.
- Paldam M. 2002. *The Cross-Country Pattern of Corruption: Economics, Culture and the Seesaw Dynamics*. European Journal of Political Economy, 18(2):215{240. 22}
- Rose-Ackerman, Susan. 1999. *Corruption and Government: Causes, Consequences, Reform*. The Press of The Univesity of Cambridge.
- Tanzi V. 1998. *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures*. IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 4.
- Transparency International. 2015. *Corruption Perceptions Index Kawasan Asia Pasifik Tahun 2004-2014*. [<http://www.transparency.org/>] diakses pada 20 Februari 2016
- Treisman D. 2000. *The Causes of Corruption: A Cross-National Study*. Journal of Public Economics, 76: 3, pp 399-457.
- [UNISDEM] Uni Sosial Demokrat. 2015. *Metode Korupsi di Asia Pasifik Semakin Vulgar dan Telanjang*. [<http://www.unisosdem.org>] diakses pada 21 Maret 2016.
- World Bank. 1997. *Helping Countries Combat Corruption*. The Role of the World Bank. Pp-8.